



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. LATIF HABIBI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 185377

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	373.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/96 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 73.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	82.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	143.434.671
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	709.934.671
III. HUTANG	Rp.	8.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	701.434.671

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.